

EFEKTIVITAS PELATIHAN ANALISIS WACANA KRITIS UNTUK TEKS MEDIA BAGI KOMUNITAS PERCIK SALATIGA

Penulis

Dr. Nurhayati, M.Hum.*
Herujati Purwoko, Ph.D,
I.M. Hendrarti, Ph.D,
Drs. Octiva Herry Chandra, M.Hum.

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro
Telp./Faks: (024) 76480619 *e-mail: noerhytwid@yahoo.com

ABSTRAK

Paper ini bertujuan untuk menjelaskan efektifitas pelatihan penerapan ancangan analisis wacana kritis dalam menganalisis teks media yang ditujukan kepada kelompok lembaga independen Percik Salatiga sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dengan menggunakan metode ceramah dan kerja kelompok dalam penyampaian materi, pelatihan ini cukup efektif. Bahan pelatihan dikemas dalam bentuk *power point* untuk memudahkan peserta mencerapi konsep teoretis. Para peserta sangat tertarik pada pelatihan ini dan mereka merasa pelatihan ini sangat penting dan bermanfaat. Namun Karena keterbatasan waktu, peserta tidak dapat tuntas dalam mempraktikkan penerapan ini.

Kata kunci : Analisis Wacana Kritis, Wacana Media, Praksis Sosial, Praksis Wacana, Peristiwa Sosial

ABSTRACT

This study aims to explain the effectivity of training of applying a critical discourse analysis approach on analyzing media discourse. The trainees are members of Percik communities in Salatiga. Using lecturing method with power point as a visual aid, the trainer succeed in transforming knowledge to the trainees. The training was also completed with the practice of analyzing a short authentic text taken from editorial genre. The trainees were very interested in following the activity. They felt that the training was useful and important. However, because of the limited time, they could not finished their practice of analyzing the sample text.

Keywords : Critical Discourse Analysis, Media Discourse, Social Practice, Discourse Practice, Social Practice.

1. PENDAHULUAN

Kajian analisis wacana kritis, atau AWK, mulai berkembang pada tahun 1970an. Kajian yang pada awalnya dikenal dengan nama Linguistik kritis (*Critical Linguistics*) tersebut dikembangkan berdasarkan pemikiran bahwa sebuah institusi atau kelompok masyarakat dapat mewujudkan kuasa melalui penggunaan

bahasa. Melalui bahasa, seseorang dapat mewujudkan atau menyalahgunakan kuasa, secara terang-terangan atau pun secara terselubung. Teori bahasa dapat digunakan sebagai alat untuk menguak struktur bahasa sebuah teks yang dieksploitasi untuk mewujudkan atau menyalahgunakan kuasa tersebut (Wodak 2001:6). Analisis wacana kritis dikembangkan untuk menemukan adanya

praksis penyalahgunaan kuasa, seperti hegemoni, manipulasi, yang dilakukan melalui praksis wacana (van Dijk 1993)

Berdasarkan konsep tersebut, objek penelitian analisis wacana kritis banyak berkaitan dengan wacana politik, sosial, dan media. Penggunaan ancangan analisis wacana kritis untuk mengkaji ketiga jenis wacana tersebut mampu menjembatani rumpang yang disisakan oleh kelompok penelitian linguistik dan kelompok penelitian sosial. Peneliti linguistik cenderung memberi perhatian pada wujud dan fungsi Bahasa tanpa memperhatikan aspek kritis, yakni menemukan relasi sosial yang ada di balik wacana tersebut. Sebaliknya, fokus penelitian sosial pada umumnya hanya tentang permasalahan sosial tanpa dilengkapi dengan eviden linguistik dalam wacana tersebut.

Seiring dengan meningkatnya literasi masyarakat dan kesadaran masyarakat dalam mengikuti perkembangan sosial (yang di dalamnya mencakupi ranah politik, ekonomi, dan budaya) melalui media, institusi-institusi sosial banyak memanfaatkan media untuk melakukan sosialisasi, mempengaruhi, serta menghegemoni masyarakat agar masyarakat berfikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan kehendak institusi tersebut. Dalam hal ini, media dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan kuasa maupun menyalahgunakan kuasa oleh kelompok tertentu. Bahkan, media sendiri sebagai sebuah insitusi juga menggunakan kuasanya untuk kepentingan institusi lain atau kepentingan media itu sendiri dalam menjalankan fungsinya sebagai penyambung ranah publik dengan ranah privat (Fairclough, 1995).

Melihat fenomena tersebut, kami merasa perlu mengajak masyarakat untuk bersikap kritis dalam mengkonsumsi media. Masyarakat tidak boleh begitu saja larut dalam pemberitaan atau advertensi

media, karena bisa jadi apa yang dilakukan media tersebut diselipi dengan agenda-agenda tertentu yang dapat merugikan masyarakat secara luas.

Ajakan untuk bersikap kritis terhadap media ini dapat dilakukan dengan membekali pengetahuan tentang cara-cara yang kritis dalam 'membaca' media kepada kelompok-kelompok sosial yang berkecimpung di bidang advokasi masyarakat. Salah satunya adalah komunitas *Percik*, yakni sebuah lembaga independen yang kegiatannya antara lain adalah melakukan penelitian sosial dan memberikan advokasi kepada masyarakat tentang permasalahan sosial.

Kami, tim pengabdian dari Fakultas Ilmu Budaya UNDIP telah mengajak dan memberi pelatihan kepada anggota komunitas *Percik* tentang penerapan ancangan analisis wacana kritis dalam 'mengonsumsi' media. Tujuan paper ini adalah menjelaskan pelaksanaan pelatihan penerapan ancangan analisis wacana kritis tersebut sebagai bentuk pengabdian kami kepada masyarakat. Masalah penelitian yang dijawab dalam paper ini adalah (i) apakah materi pelatihan dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan, (ii) apakah metode yang digunakan dalam penyampaian materi tepat, dan (iii) apakah pelatihan tersebut signifikan bagi peserta pelatihan.

2. KERANGKA TEORETIS: ANALISIS WACANA KRITIS

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, analisis wacana kritis adalah sebuah ancangan yang diguakan untuk menganalisis wacana yang ditengarai sebagai praksis dalam menjalankan relasi kuasa, seperti hegemoni, dominasi, dan diskriminasi baik secara terang-terangan maupun terselubung (van Dijk 1993). Dulu, sebuah kelompok sosial mempertahankan dan melebarkan

kuasanya melalui perang atau tindakan fisik yang lain. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, perang fisik dianggap kurang efektif dan ditempatkan sebagai pilihan terakhir. Perang modern adalah perang kognisi, yakni upaya untuk mengontrol minda kelompok lain agar memiliki cara pikir seperti yang diinginkan oleh kelompok yang berkuasa. Efek yang diharapkan adalah kelompok yang dikontrol itu akan mentaati kelompok yang berkuasa. Bahasa ditengarai sebagai alat yang ampuh dalam melakukan kontrol tersebut. Kelompok yang berkuasa dapat menanamkan pengaruhnya secara terang-terangan atau terselubung dengan bahasa.

Di dalam analisis wacana kritis, berwacana, yaitu tindak menggunakan bahasa, adalah bagian dari praksis sosial (Fairclough 2001: 24). Setidaknya ada tiga penalaran yang dapat digunakan untuk menjelaskan pernyataan di atas, yakni konsep praksis sosial, konsep berwacana, dan hubungan antara praksis berwacana dan praksis sosial yang lain.

Pertama, praksis sosial adalah tindak mengejawantahkan (*to articulate*) elemen-elemen sosial seperti aksi dan interaksi, relasi sosial, identitas sosial, dan 'dunia materi' (Fairclough 2003: 25). Pengejawantahan itu dapat dilakukan melalui tindakan verbal maupun non-verbal.

Kedua, yang dilakukan oleh seseorang pada waktu menggunakan bahasa adalah menyeleksi satuan leksikal mana saja yang akan digunakan; satuan leksikal mana yang tidak boleh digunakan; bentuk gramatikal seperti apa yang akan disusun; dan bentuk gramatikal seperti apa yang harus dihindari. Tindak menyeleksi alat kebahasaan tersebut ditentukan oleh dua faktor, yakni kaidah linguistik dan faktor non-linguistik. Kaidah linguistik menentukan apakah bentuk bahasa yang

dipilih tersebut gramatikal dan berterima atau tidak. Faktor non-linguistik disebut juga sebagai faktor kontekstual yang antara lain terdiri atas kepada siapa wacana tersebut ditujukan, kapan dan di mana wacana itu diproduksi, apa tujuan memproduksi wacana tersebut, nilai-nilai sosial seperti apa yang harus dipatuhi dalam memproduksi wacana, dan apakah tujuan berwacana itu harus diungkapkan secara eksplisit atau implisit.

Ketiga, bagian dari praksis sosial yang lain, yakni praksis merealisasikan elemen-elemen sosial yang telah disebutkan pada bagian pertama, dapat dilakukan baik secara verbal maupun secara non-verbal. Dengan demikian, dalam melakukan praksis wacana seseorang, selain melakukan tindak menggunakan bahasa, juga melakukan tindak sosial tertentu, yakni merepresentasikan fakta sosial, mengkonstruksi relasi sosial, dan mengidentifikasi subjek sosial (Fairclough 2003: 25). Relasi antara praksis wacana dan praksis sosial yang lain bersifat dialektik. Wacana dapat membentuk dan sekaligus dibentuk oleh praksis sosial yang lain (Fairclough 2001: 23).

Dari ulasan di atas, dapat disarikan bahwa pada waktu seseorang melakukan praksis wacana maka dalam praksisnya itu dia dipengaruhi oleh konteks sosial yang dibentuk dari sebuah struktur sosial. Selanjutnya, praksis wacana tertentu mampu membentuk, mempertahankan, mengubah, praksis sosial yang lain, dan pada akhirnya mampu mempertahankan struktur sosial yang sudah ada atau membentuk struktur sosial baru. Praksis wacana yang dilakukan oleh kelompok dominan pada umumnya dipengaruhi oleh cara pandang (ideologi) dan keinginan untuk mempertahankan relasi dominasinya dan menanamkan nilai ideologis seluas-luasnya, sehingga praksis wacana

kelompok tersebut mampu mengontrol cara pandang dan perilaku masyarakat.

3. METODE

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan di komunitas *Percik* adalah mengajak peserta pengabdian untuk bersama-sama menerapkan ancangan analisis wacana kritis untuk menganalisis teks media. Kegiatan itu sendiri dilakukan melalui tiga tahap, yakni penyiapan materi, penyampaian materi, dan evaluasi pelaksanaan.

Materi pelatihan berupa kumpulan power point yang berisi kerangka teoretis tentang analisis wacana kritis dan wacana media. Power point dibuat dengan ilustrasi-ilustrasi dan diagram alur untuk memudahkan peserta memahami isi materi. Materi pelatihan yang lain berupa contoh teks sederhana yang berupa teks editorial dari koran online *Media Indonesia* edisi Senin, 13 Juni 2016, yang berjudul "Menggugat Aturan yang Melampaui Batas." Penyiapan materi dikerjakan oleh tim pengabdian yang terdiri atas Herujati Purwoko, Ph.D, I.M. Hendrarti, Ph.D, Dr. Nurhayati, M.Hum., dan Drs. Octiva Herry Chandra, M.Hum.

Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah dan kerja kelompok. Ceramah dilakukan untuk memberi pengetahuan tentang konsep teoretis AWK serta pentingnya menggunakan AWK dalam melakukan penelitian-penelitian yang menggunakan teks sosial sebagai data. Bahan ceramah dirancang melalui kajian kepustakaan dari karya-karya Fairclough (1995, 2001, dan 2003) dan van Dijk (1993). Ceramah disampaikan oleh Dr. Nurhayati, M.Hum. Selama ceramah berlangsung, tim penelitian juga melakukan observasi ihwal pengetahuan awal para peserta tentang konsep-konsep teoretis dalam menganalisis teks.

Kerja kelompok dilakukan sebagai bentuk latihan penerapan AWK untuk

menganalisis teks. Umpan balik dilakukan untuk menampung masukan dan pertanyaan dari para peserta. Kerja kelompok dan umpan balik ini dipandu dan didampingi oleh Herujati Purwoko, Ph.D, I.M. Hendrarti, Ph.D, dan Drs. Octiva Herry Chandra, M.Hum.

Ilustrasi penerapan ancangan analisis wacana kritis dalam menganalisis teks media diambilkan dari salah satu artikel editorial harian *Media Indonesia* edisi Senin, 13 Juni 2016, yang berjudul "Menggugat Aturan yang Melampaui Batas." Tujuan latihan analisis ini adalah menjelaskan sebuah fenomena sosial, yakni praksis wacana dalam institusi media dengan menggunakan ancangan analisis wacana kritis.

Pilihan artikel editorial ini didasarkan pada pengetahuan bersama bahwa editorial adalah 'suara' dari sebuah media. Gagasan, sikap, ideologi, dan keberpihakan sebuah media paling jelas ditemukan dalam editorial.

Cara menganalisis artikel editorial tersebut mengikuti langkah-langkah metodologis yang digagas oleh Fairclough (2003), yang terdiri atas deskripsi alat kebahasaan, interpretasi proses praksis wacana, dan eksplanasi relasi dialektik antara praksis wacana dan struktur sosial.

Umpan balik dilakukan untuk melihat apakah para peserta memang merasa perlu memperoleh pengetahuan tentang AWK ini, seberapa jauh pemahaman mereka terhadap pelatihan yang kami berikan, serta apakah komunitas *Percik* memerlukan pelatihan lanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi tiga bagian yang menjelaskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kampung *Percik* Salatiga, yang diselenggarakan pada tanggal 21 November 2017. Bagian pertama akan mendeskripsikan kesesuaian materi pelatihan. Bagian kedua menjelaskan penyajian materi,

dan bagian terakhir menjelaskan hasil evaluasi pelatihan.

Materi yang dipilih adalah materi tentang konsep analisis wacana kritis versi Fairclough (2001 dan 2003), serta konsep wacana media dari Fairclough (1995). Materi pendukung diperoleh dari van Dijk (1993), dan Wodak (2001). Materi ini sesuai dengan kebutuhan para peserta yang setakat ini belum pernah mempelajari analisis wacana kritis.

Penyajian materi disesuaikan dengan hasil observasi pengetahuan awal tentang konsep analisis wacana yang dimiliki oleh para peserta pelatihan. Isi ceramah adalah konsep teoretis tentang analisis wacana kritis, peran media dalam praksis sosial, dan peran analisis wacana kritis dalam menganalisis media.

Dari hasil observasi, diperoleh gambaran bahwa para peserta belum pernah mendapatkan pengetahuan tentang analisis wacana kritis. Mereka adalah para peneliti masalah-masalah sosial, sehingga cara menganalisis data dan menjawab permasalahan pada umumnya dilakukan melalui bingkai teori-teori sosial. Tugas kami sebagai narasumber adalah mengisi rumpang dalam minda mereka bahwa dengan bahasa, subjek sosial dapat melakukan praksis sosial, khususnya yang berkaitan dengan pemertahanan dan pertarungan kuasa. Alat-alat kebahasaan yang berupa leksikogramatikal (Halliday 1994) dapat dieksploitasi untuk mengontrol pihak lain baik secara terang-terangan maupun tersamar. Oleh karena itu, para peneliti teks sosial harus memiliki pengetahuan bentuk leksikogramatikal seperti apa yang berpotensi digunakan untuk melakukan praksis pemertahanan atau pertarungan kuasa. Dengan memiliki pengetahuan tentang relasi antara penggunaan bahasa dan praksis kesalahan sosial (*social wrong*), para peserta dapat mengkritisi produk-produk media yang kelihatannya biasa saja, tetapi dibalik itu bersemayam praksis sosial yang merugikan masyarakat.

Ceramah juga berisi wacana media, yakni seperti apa bentuk komunikasi dalam media, bagaimana peran media dalam struktur sosial, serta bagaimana media mengartikulasikan kuasanya. Pada bagian ini pada umumnya para peserta telah memiliki *share knowledge* tentang peran media dalam struktur sosial, namun mereka masih awam tentang bentuk-bentuk kuasa yang diartikulasikan media melalui bahasa.

Selama kegiatan ceramah, peserta dilibatkan untuk menemukan ilustrasi-ilustrasi aktual mengenai peristiwa sosial yang sedang mengemuka di hadapan masyarakat sehingga peserta dapat menggunakan pengetahuan mereka tentang peristiwa sosial tersebut untuk memahami konsep teoretis tentang analisis wacana.

Hal yang agak menyulitkan peserta adalah memahami konsep-konsep linguistik seperti konsep transitivitas, implikatur, tindak tutur, presuposisi, dan ketakrifan. Padahal, konsep-konsep tersebut penting untuk dikuasai agar seorang peneliti mampu mengidentifikasi penanaman ideologis dan pemertahanan kuasa yang dilakukan oleh subjek sosial melalui bahasa. Oleh karena itu, bagian ini menjadi catatan penting bagi tim pengabdian agar penyediaan dan penyampaian materi dibuat sedemikian rupa untuk memudahkan peserta pelatihan memahami konsep linguistik tersebut.

Penyajian materi yang bersifat praktis, yakni inti dari pelatihan adalah mengajak peserta untuk menerapkan ancangan analisis wacana kritis dalam menganalisis teks editorial. Di bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa teks editorial dipilih dengan mempertimbangkan bahwa cara pandang ideologis media terhadap objek yang diberitakan paling tampak dalam editorial. Oleh karena itu, dengan menganalisis teks editorial diharapkan para peserta akan menemukan keberpihakan media terhadap pemberitaan peristiwa.

Dalam pelatihan kali ini, topik editorial yang dipilih adalah ihwal kasus penertiban

warung makan milik Saeni oleh Satpol Pamong Praja Kabupaten Serang karena Saeni dianggap melanggar Perda Nomor 2 tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat dan Razia. Tindakan petugas Satpol PP tersebut menjadi pemicu konflik sosial karena menimbulkan pro dan kontra. Pemberitaan ihwal peristiwa tersebut juga dipengaruhi oleh sikap media terhadap peristiwa tersebut. Oleh karena itu, pilihan materi pelatihan ini tepat sekali agar peserta mengetahui bahwa media mempunyai kuasa untuk mempengaruhi pembacanya dalam mempersepsi peristiwa.

Latihan analisis dilakukan dalam bentuk kerja kelompok. Para peserta dibagi menjadi tiga kelompok, dan masing-masing dipandu oleh seorang pendamping. Langkah pertama dalam menerapkan ancangan analisis wacana kritis dalam pelatihan ini adalah melakukan deskripsi terhadap alat kebahasaan yang dipilih oleh dewan redaksi *Media Indonesia* untuk menghasilkan teks editorial tersebut. Peserta diminta membaca secara keseluruhan teks tersebut. Setelah itu, peserta diminta untuk mengelompokkan klausa dalam teks tersebut berdasarkan kesamaan partisipan. Langkah ini adalah penerapan konsep transitifitas untuk mengidentifikasi peristiwa sosial apa saja yang direpresentasikan melalui teks tersebut dan bagaimana cara merepresentasikannya.

Deskripsi ini menghasilkan 11 peristiwa, yakni: razia, Satpol PP dan Pemerintah, peraturan, agama, warung, masyarakat yang berpuasa, pernyataan, rakyat, dan puasa. Dari hasil analisis mereka menemukan bahwa peristiwa yang ditonjolkan, yakni paling banyak direpresentasikan adalah tindakan Satpol PP dan peraturan. Dalam teks tersebut, Satpol PP direpresentasikan sebagai partisipan aktif yang melakukan tindak

sosial (*social practice*) *merazia*, *membajak*, dan *sweeping*. Aturan direpresentasikan melalui proses relasional dan identifikasional. Proses tersebut digunakan untuk mengkonstruksi Perda Nomor 2 tahun 2010 berdasarkan perspektif *Media Indonesia*. Perda tersebut direpresentasikan sebagai (i) aturan yang digunakan oleh Negara sebagai alat untuk menghalang-halangi warga mencari nafkah; (ii) aturan yang tidak fair; (iii) aturan yang inkonstitusional dan bertentangan dengan peri kemanusiaan; dan (iv) sebagai bentuk kekerasan structural. Dari hasil analisis tersebut, peserta menjadi tahu bahwa *Media Indonesia* tidak berpihak pada pemerintah daerah.

Peserta juga diminta untuk mengidentifikasi klausa, frasa, atau kata yang menunjukkan relasi interpersonal atau sikap penulis teks, dalam hal ini dewan redaksi, terhadap peristiwa yang disampaikan. Penilaian negatif terhadap aturan dan penerapan aturan. Sikap tersebut diidentifikasi melalui penggunaan *adjunct* seperti *sangat aneh*, *jelas-jelas*, *justru*, *terang benderang*, *bahkan*, dan *sungguh*. Penggunaan *adjunct* tersebut menunjukkan bahwa penutur (dewan redaksi) mengungkapkan perasaan emosinya ketika merepresentasikan aturan tentang pelarangan jualan makanan di siang hari dan kinerja Satpol PP.

Dalam melakukan deskripsi, para peserta juga diminta mengidentifikasi penggunaan *mood system* dan modalitas untuk memperkuat temuan tentang relasi sosial tersebut. Hasil yang diperoleh adalah bahwa dari 27 klausa yang ada, 25 klausa berupa klausa deklaratif, satu klausa berbentuk imperatif, dan satu klausa berbentuk interogatif. Secara teoretis, klausa deklaratif digunakan untuk memberi informasi, klausa imperatif digunakan untuk memberi perintah, dan klausa interogatif digunakan untuk meminta informasi. Dari distribusi

tersebut, peserta menjadi mengerti bahwa yang paling dominan dilakukan dewan redaksi dalam wacana editorial tersebut adalah memberikan informasi kepada pembaca. Klausa imperatif dalam teks tersebut digunakan untuk meminta/menyuruh pembaca melihat respons rakyat ketika Satpol PP merazia warung Saeni. Klausa interogatif dalam teks ini digunakan untuk mengungkapkan pertanyaan retorik, yakni pertanyaan yang tidak perlu dijawab oleh pembaca. Pertanyaan itu adalah: *Bukankah berpuasa merupakan ujian menahan diri?*

Dari hasil deskripsi tersebut, selanjutnya peserta diminta untuk melakukan analisis tahap kedua, yakni menginterpretasi proses dalam menghasilkan wacana. Dalam hal ini, makna yang hendak ditemukan adalah hubungan antara bentuk wacana dan konteks yang menentukan konstruksi wacana tersebut. Dengan kata lain, peserta diminta untuk menemukan alasan mengapa dewan redaksi menghasilkan wacana seperti tersebut di atas. Untuk itu, peserta harus menginterpretasi konteks yang diasumsikan membentuk praksis wacana tersebut. Konteks tersebut terdiri atas konteks situasi dan konteks historis.

Untuk dapat menemukan konteks situasi yang kemungkinan membentuk praksis wacana tersebut, peserta diminta untuk mengidentifikasi latar situasi dan latar institusi. Latar situasi terdiri atas: (i) apa yang sedang terjadi dalam praksis wacana tersebut; (ii) siapa saja yang terlibat; (iii) bagaimana relasi sosial yang dibangun; dan (iv) bagaimana peran Bahasa dalam praksis sosial tersebut (Fairclough 2003: 146).

Dari hasil analisis terhadap latar situasi tersebut, peserta dapat menemukan makna bahwa dewan redaksi melakukan tindak wacana memberi informasi kepada pembaca tentang pemberlakuan aturan pelarangan membuka warung pada siang

hari di bulan Ramadan. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa subjek yang terlibat dalam praksis wacana tersebut adalah dewan redaksi sebagai bagian dari institusi media dan masyarakat sebagai penerima teks.

Kedudukan media sebagai institusi yang menghubungkan kelompok publik dan kelompok privat juga turut mempengaruhi praksis wacana dalam editorial tersebut. Relasi yang dibangun adalah media sebagai subjek yang memiliki pengetahuan tentang peristiwa yang terjadi, aturan, dan pemberlakuan aturan dan masyarakat sebagai kelompok yang tidak memiliki akses langsung untuk memperoleh informasi mengenai peristiwa tersebut. Dalam mengkonstruksi peristiwa tersebut, dewan redaksi menggunakan gagasan ideologis tertentu yang dipraanggapkan telah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Strategi ini dilakukan dengan memilih bentuk komunikasi presuposisi. Oleh karena itu, peristiwa yang dilaporkan oleh *Media Indonesia* kepada masyarakat adalah bentukan atau versi *Media Indonesia*. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia ragam formal dan tulis. Ini menunjukkan bahwa *Media Indonesia* menempatkan praksis wacana ini dalam domain formal dan target pembacanya adalah masyarakat di seluruh tanah air.

Peran media sebagai alat kontrol sosial juga menyebabkan mengapa dalam praksis wacana tersebut *Media Indonesia* mengungkapkan sikap keberpihakan kepada masyarakat sebagai korban pemberlakuan aturan. Sikap kritis media ditunjukkan dengan merepresentasikan aturan sebagai alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengartikulasikan kuasanya. Penyalahgunaan aturan oleh pemerintah ditunjukkan melalui tindakan pemerintah yang tidak adil dalam memberlakukan aturan, karena rumah makan besar seperti restoran dan kafe tidak terjerat aturan tersebut.

Di bagian identifikasi makna ideologis ini, peserta masih merasa asing dengan konsep-konsep seperti presuposisi, implikatur, dan koherensi. Oleh karena itu, mereka masih mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi pemikiran ideologis yang mempengaruhi *Media Indonesia* melakukan praksis wacana mengkritisi pemerintah tersebut.

Setelah melakukan interpretasi, para peserta diminta untuk menemukan relasi dialektik dari praksis wacana yang dilakukan oleh dewan redaksi *Media Indonesia* tersebut dengan struktur sosial yang ada. Langkah ini dinamakan eksplanasi. Di dalam eksplanasi ini para peserta diminta untuk menjelaskan apakah praksis wacana yang dilakukan oleh *Media Indonesia* ini mengubah relasi kuasa antara pemerintah dengan masyarakat atau mempertahankan relasi kuasa yang selama ini dibentuk. Pelaksanaan langkah ini kurang maksimal karena alokasi waktu untuk praktik penerapan analisis ini terbatas. Oleh karena itu, para peserta belum tuntas dalam melakukan tahap analisis ini.

Umpan balik yang diberikan oleh para peserta atas pelatihan ini diberikan dalam bentuk pertanyaan, kesan, dan masukan. Menurut para peserta, pelatihan ini sangat berguna bagi mereka, karena fokus kegiatan mereka memang di ranah penelitian sosial. Menurut salah seorang peserta, masyarakat kampus seharusnya memberi pencerahan kepada masyarakat agar masyarakat juga mampu berpikir kritis dalam menerima informasi. Para peserta juga berharap ada pelatihan seperti ini di waktu mendatang agar pemahaman mereka tentang linguistic kritis lebih mendalam.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pengamatan dan analisis terhadap pelaksanaan pelatihan penerapan analisis wacana kritis bagi komunitas percik ini dapat disimpulkan beberapa hal berikut.

- (i) Komunitas Percik yang kegitannya melakukan penelitian sosial belum

pernah memperoleh pengetahuan tentang analisis wacana kritis.

- (ii) Pengetahuan ini penting buat mereka karena dengan memahami analisis wacana kritis, mereka dapat menganalisis objek secara lebih tajam.
- (iii) Alokasi waktu pelatihan yang sangat terbatas menyebabkan tutorial dan latih analisis tidak dapat dilakukan secara detail sehingga peserta merasa masih kurang.
- (iv) Dengan mempertimbangkan antusias peserta yang sangat tinggi dalam mempelajari analisis wacana kritis ini, tim pengabdian berencana mengadakan pengabdian lanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, tim Pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ilmu Budaya UNDIP yang terdiri atas Herujati Purwoko, Ph.D, I.M. Hendrarti, Ph.D, Dr. Nurhayati, M.Hum., dan Drs. Octiva Herry Chandra, M.Hum. mengucapkan terima kasih kepada pihak FIB yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dan juga kepada direktur Lembaga *Percik*, Bapak Pradjarta Dirdjosanjoto beserta staf yang telah menyediakan sarana, prasarana, dan mengundang para peserta demi terlaksananya kegiatan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para peserta pelatihan yang dengan serius, antusias, dan tentu saja kritis dalam mengikuti pelatihan ini dari awal hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

Fairclough, Norman. (1995). *Media Discourse*. London: Sage.

----- (2001). *Language and Power*. edisi kedua. London: Longman.

------. (2003). *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. London: Routledge.

Halliday, M. (1994). *An Introduction to Functional Grammar*. London: Edward Arnold.

van Dijk, Teun A. (1993). Principles of Critical Discourse Analysis. Dalam *Discourse and Society*. Vol. 4 (2): 249-283.

Wodak, Ruth. 2001. What CDA is about
– A Summary of Its History, Important Concepts, and Its Developments. Dalam Wodak, Ruth. and Meyer, Michael (eds.)

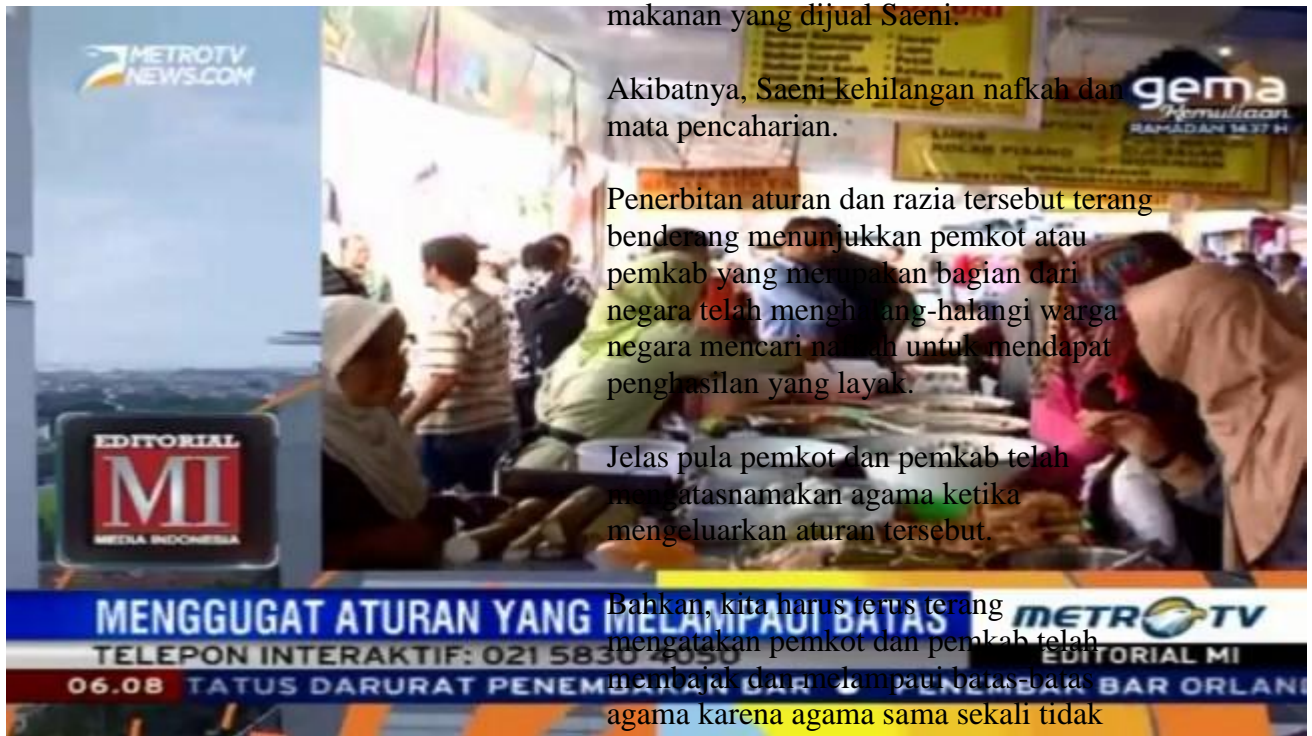
Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage.

Lampiran
Diunduh dari
<http://news.metrotvnews.com/editorial-media-indonesia/MkMYqeDk-menggugat-aturan-yang-melampaui-batas>

Menggugat Aturan yang Melampaui Batas

Senin, 13 Jun 2016 06:13 WIB

[News Editorial Media Indonesia](#)



?Menggugat Aturan yang Melampaui Batas

Konstitusi menyatakan negara menjamin warga negara memperoleh pendapatan yang layak bagi kemanusiaan.

Sangat aneh, dan jelas sebuah tindakan inkonstitusional dan tidak manusiawi ketika negara justru menghalang-halangi warga negara memperoleh penghasilan.

Akan tetapi, itulah yang terjadi saat

sejumlah pemerintah kota dan kabupaten menerbitkan aturan yang melarang warung makan buka pada siang hari selama Ramadan.

Berbekal aturan itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merazia warung-warung makan yang buka siang hari saat Ramadan.

Razia sering kali dilakukan secara berlebihan, seperti yang terjadi ketika Satpol PP Kota Serang merazia dan menutup warung makan serta menyita makanan yang dijual Saeni.

Akibatnya, Saeni kehilangan nafkah dan mata pencaharian.

Penerbitan aturan dan razia tersebut terang benderang menunjukkan pemkot atau pemkab yang menapak bagian dari negara telah menghalang-halangi warga negara mencari nafkah untuk mendapat penghasilan yang layak.

Jelas pula pemkot dan pemkab telah mengatasnamakan agama ketika mengeluarkan aturan tersebut.

Bahkan, kita harus terus terang mengatakan pemkot dan pemkab telah membajak dan melampaui batas-batas agama karena agama sama sekali tidak mengajari orang tidak boleh berjualan atau membuka warung makan di siang hari selama Ramadan.

Agama justru menghormati dan menoleransi mereka yang tidak berpuasa.

Agama membolehkan orang-orang tertentu untuk tidak berpuasa.

Warung-warung makan itu berfungsi menyediakan makanan kepada orang-

orang yang tidak berpuasa itu.

Aturan seperti itu terbit biasanya didasarkan pada asumsi warung-warung makan itu mengganggu orang-orang yang berpuasa.

Padahal, mereka yang sungguh-sungguh berpuasa tidak akan tergoda dan kemudian berbuka di warung-warung makan tersebut.

Taruhlah warung-warung makan itu mengganggu orang berpuasa, tetapi justru di situlah tantangannya, ujiannya.

Bukankah berpuasa merupakan ujian menahan diri?

Aturan semacam itu juga tidak fair.

Itu hanya menyasar warung-warung makan kecil. Restoran atau kafe sepertinya tak menjadi target aturan tersebut.

Aturan pemkot atau pemda serta razia yang dilakukan Satpol PP jelas merupakan kekerasan struktural yang bisa menyebabkan kemiskinan struktural.

Sungguh sebuah ironi ketika dulu kekerasan atau sweeping dilakukan kelompok intoleran, tetapi kini dilakukan struktur dalam negara.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin, dan Gubernur Banten Rano Karno sudah menyatakan penyesalan mereka. Akan tetapi, pernyataan saja tidak cukup.

Harus ada langkah konkret dari pejabat tersebut untuk meminta pemkot atau pemda mencabut aturan itu dan menghentikan razia terhadap warung-

warung makan.

Pemkot atau pemkab semestinya mencabut aturan tersebut.

Aturan yang melarang warung makan buka pada siang hari selama Ramadan jelas inkonstitusional, bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan serta melampaui agama.

Mempertahankan aturan tersebut hanya akan melanggengkan kekerasan selama Ramadan. Pula, mempertahankannya hanya akan membuat pemkot atau pemkab berhadap-hadapan dengan rakyat.

Lihat saja bagaimana rakyat justru menaruh simpati dan menggalang dana buat Saeni, dan sebaliknya, menyerang keras Pemkot Serang.

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI KEGIATAN
PENGABDIAN

